

**POLITIK KEBIJAKAN MITIGASI KERUSAKAN LINGKUNGAN
MASA PEMERINTAHAN SCOTT MORRISON 2019-2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SHANIA DIVAYANTI

18323091

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**POLITIK KEBIJAKAN MITIGASI KERUSAKAN LINGKUNGAN
MASA PEMERINTAHAN SCOTT MORRISON 2019-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SHANIA DIVAYANTI

18323091

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

POLITIK KEBIJAKAN MITIGASI KERUSAKAN LINGKUNGAN
MASA PEMERINTAHAN SCOTT MORRISON 2019-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

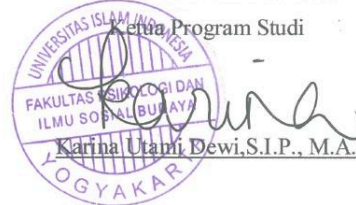
Pada Tanggal,



12 Februari 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'SEPTUAS RIBU RUPIAH' vertically, 'Rp. 1000' in large numbers, and 'METERAI TEMPEL' horizontally. A unique alphanumeric code '187BALX045282894' is printed at the bottom of the stamp.

Shania Divayanti

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.8.4 Proses Penelitian	16
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II	18
Kebijakan Luar Negeri Scott Morrison	19
BAB III	24
3.1 Politik Domestik	25
3.1.1 Birokrasi	26
<i>Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO)</i>	26
3.1.2 Kelompok Partai Politik	28
3.1.3 Kelompok yang Berkepentingan	33
<i>Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council</i>	33
3.1.4 Media Massa	34

3.2 Ekonomi dan Militer	36
3.2.1 Peran Ekonomi.	36
3.2.2 Peran Militer	38
3.3 Faktor Internasional	41
BAB IV	46
PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pembuatan Decision Making

11

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Kebijakan Lingkungan

Tabel 02. Kesimpulan

DAFTAR SINGKATAN

<i>AS</i>	<i>: Amerika Serikat</i>
<i>CPRS</i>	<i>: Carbon Pollution Reduction Scheme</i>
<i>KTT</i>	<i>: Konferensi Tingkat Tinggi</i>
<i>ERF</i>	<i>: Emission Reduction Fund</i>
<i>AUD</i>	<i>: Australia Dollar</i>
<i>USD</i>	<i>: United States Dollar</i>
<i>ABC</i>	<i>: Australian Broadcasting Corporation</i>
<i>SBS</i>	<i>: Special Broadcasting Service</i>
<i>DWP</i>	<i>: Defence White Paper</i>
<i>CSIRO</i>	<i>: Commonwealth Scientist of International Relation Organization</i>
<i>WTO</i>	<i>: World Trade Organization</i>

ABSTRAK

Terjadinya kebakaran hutan yang melanda di Australia, menjadikan Perdana Menteri Scott Morrison mendapatkan banyak teguran akibat kerusakan yang ditimbulkan karena sikapnya yang tidak terlalu peduli dengan keadaan lingkungan yang sedang terjadi. Terlebih dampak yang dihasilkan oleh kebakaran hutan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal saja, namun memberikan dampak kerugian kepada negara yang berada bersebelahan dengan Australia. Dengan mengangkat isu ini, penulis menggunakan teori yang diterapkan oleh William D. Coplin yaitu Decision Making. Pada teori tersebut terdapat beberapa faktor seperti faktor politik domestik, faktor ekonomi dan militer serta faktor internasional. Australia yang terkenal dengan pertambangan batu baranya tentu akan cukup berpengaruh juga terhadap kerusakan lingkungan. Namun tentu itu akan saling memberikan efek ke masing-masing sektor, sebagaimana lingkungan dan perekonomian cenderung berbanding terbalik. Sementara dengan Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal dengan fokusnya yang berada di sektor perekonomian. Riset ini dilakukan untuk mengetahui mengapa Scott Morrison memilih untuk berkontribusi dalam pemulihan kerusakan lingkungan.

Kata-kata kunci: Australia, Scott Morrison, Kerusakan Lingkungan, Decision Making, Partai Liberal

ABSTRACT

The forest fires that hit Australia resulted in Prime Minister Scott Morrison receiving a lot of reprimand for the damage caused due to his attitude of not really caring about the current environmental situation. Moreover, the impact produced by forest fires is not only felt by local communities, but also has a detrimental impact on countries that are adjacent to Australia. By raising this issue, the author uses the theory applied by William D. Coplin, namely Decision Making. In this theory there are several factors such as domestic political factors, economic and military factors and international factors. Australia, which is famous for its coal mining, will certainly have quite an impact on environmental damage. But of course this will have mutual effects on each sector, as the environment and the economy tend to be inversely proportional. Meanwhile, Scott Morrison comes from the Liberal Party and his focus is on the economic sector. This research was conducted to find out why Scott Morrison chose to contribute to the restoration of environmental damage.

Keywords: Australia, Scott Morrison, Environment Damage, Decision Making, Liberal Party

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran yang melanda Australia di penghujung tahun 2019 tercatat sebagai kebakaran terbesar dari beberapa tahun silam (Parliament of Australia, 2020). Hutan di Australia menduduki sepuluh besar hutan terluas di dunia, setelah adanya hutan Amazon yang melintas di beberapa negara lainnya (Butler, 2020). Mendekati akhir tahun 2019, benua Australia tengah digemparkan dengan munculnya kobaran api di beberapa titik di Brisbane hingga Sydney (BBC News, 2019). Daerah yang tadinya dominan berwarna hijau kian telah berubah menjadi kawasan merah setelah api berkobar pada kawasan tersebut. Kawasan hutan itu terletak pada Negara bagian New South Wales serta Queensland yang berada dalam status darurat (BBC News, 2019). Tercatat ada 120 titik api yang berkobar pada kedua Negara bagian tersebut (BBC News, 2019). Tidak sedikit satwa bahkan manusia yang terdampak dalam kebakaran ini. Sehingga menyebabkan kematian karena gangguan pernafasan akibat minimnya udara bersih dan para satwa yang terjebak.

Tidak hanya hutan yang turut menjadi sasaran api, namun permukiman warga juga menjadi sasaran atas kebakaran hutan (Nursastri, 2020). Pada kebakaran hutan di akhir tahun 2019 hingga tahun 2020, tercatat berkisar 7,3 miliar hektar lahan hutan yang hangus terbakar dalam enam bagian negara di Australia (Parliament of Australia, 2020).

Sejauh ini kebakaran hutan yang melanda Australia tercatat sebagai kebakaran terluas dengan luas berkisar wilayah Australia itu sendiri. Seperti layaknya hutan Amazon yang berada di Brazil, di mana hutan Amazon juga pernah hangus terbakar yang mana telah menghabiskan sekiranya 7 hektar lahan perhutanan (Nursastri, 2020).

Pasalnya, kebakaran yang melanda Australia memberikan dampak ke beberapa negara sekitar Australia, seperti New Zealand. Tak hanya warga Australia saja yang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan tersebut, melainkan asap dari kebakaran hutan disana telah membumbung tinggi hingga mengarah ke area pasifik (Hastuti, 2020). Di mana memang pada awal terjadinya kebakaran hutan Australia atau dengan sebutan Black Summer terjadi pada Australia bagian Selatan, hingga terjadi peningkatan suhu pada daerah Selatan yang menyebabkan kebakaran semakin membesar (Rumpff, 2023). Kapasitas dari kebakaran itu cukup tinggi hingga menimbulkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini menciptakan badai dari hasil uap yang diproduksi dari kebakaran.

Tentu saja di angka 7,3 hektar lahan yang terbakar cukup membuat warga sekitar yang tinggal di sana merasa cemas dan khawatir. Serta tak hanya warga Australia saja yang menghirup udara tercemar, melainkan asap dari kebakaran hutan di sana telah membumbung tinggi dan mengarah ke area Pasifik (Rahajeng Kusumo Hastuti, 2020). Pada awal terjadinya kebakaran Australia ini bagian Selatan, terjadi peningkatan suhu pada daerah tersebut yang menyebabkan kebakaran pun semakin membesar. Sehingga kapasitas dari kebakaran itu cukup tinggi dan menimbulkan kenaikan suhu yang mana dari kenaikan suhu ini menciptakan badai dari hasil uap yang diproduksi dari kebakaran. Hingga akhirnya

menciptakan suatu badai yang terjadi di daerah Selatan. Menyebabkan api yang mulai merembet ke bagian Utara yang memiliki suhu dominan hangat dibanding di daerah Selatan (Cappucci, 2021). Tidak hanya itu, kebakaran tersebut cukup menghambat aktivitas masyarakat dikarenakan tingginya udara yang tercemar. Khususnya pada wilayah Queensland dan New South Wales selaku wilayah yang terdampak cukup besar (Australian Government, 2019-2020).

Pada kasus kebakaran hutan yang terjadi di Australia tahun 2019, di saat yang sama terjadi pergantian Perdana Menteri tanpa melalui mekanisme pemilu. Pergantian Perdana Menteri dari Malcolm Turnbull menjadi Scott Morrison menyebabkan beberapa bentuk kebijakan berubah. Pergantian dari Malcolm Turnbull menjadi Scott Morrison yang keduanya sama-sama berasal dari Partai Liberal, hanya saja terdapat perbedaan dalam menangani kasus lingkungan. Pada saat dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri, Malcolm Turnbull mengatakan keputusannya untuk tidak menggunakan *Carbon Tax* atau pajak karbon. Malcolm Turnbull sendiri lebih memilih untuk mementingkan keadaan masyarakat yang terasa kesulitan untuk membayar tagihan rumah tangga mereka (Hutchen, 2016).

Sejalan dengan pergantian Perdana Menteri Australia di atas, Scott Morrison yang berasal dari faksi *dry* dikenal lebih mementingkan aspek-aspek persaingan ekonomi bebas. Akan tetapi aspek dari persaingan ekonomi bebas ini berdampak pada kerusakan lingkungan. Pada saat masa kampanye nya berlangsung, Scott Morrison berjanji untuk mengurangi gas emisi di Australia. Namun, janji tersebut cukup berselisih dengan fokus utama dari Partai Liberal yang lebih mementingkan persaingan ekonomi bebas. Scott Morrison berasal dari faksi *dry*, terkenal dengan mendukung penuh aktivitas persaingan bebas dalam ekonomi.

Akan tetapi, aktivitas persaingan ekonomi tersebut berdampak kepada kerusakan lingkungan. Orang-orang Partai Liberal yang berada dalam faksi *dry* cukup dikenal dengan tidak peduli pada kerusakan lingkungan. Meski demikian, Scott Morrison memutuskan untuk berkontribusi dalam pemulihan kerusakan lingkungan. Scott Morrison juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mitigasi kerusakan lingkungan yaitu, *The National Greenhouse and Energy Reporting Scheme*, *The Safeguard Mechanism*, *The Emission Reduction Fund*, *The Climate Active Carbon Neutral Standard* dan *The Renewable Energy* (Australian Government, 2020). Kebijakan tersebut dibuat guna melakukan mitigasi kerusakan lingkungan. Namun seiring berjalan waktu, Scott Morrison kalah dalam menghadapi kandidat lawan pada pemilu 2022 silam. Anthony Albanese yang berasal dari Partai Buruh berhasil mengalahkan Scott Morrison dengan janjinya untuk menerapkan sistem eco- friendly (Anwar, 2022). Scott Morrison memberikan ekspektasi yang tinggi di awal, tanpa mengingat bahwa fokus utama mereka berada di bidang ekonomi. Sejak awal, Morrison sudah berjanji untuk mengurangi emisi, namun langkah tersebut baru terlaksana setelah mendapat desakan dari berbagai pihak. Tidak sedikit yang mendesak Australia terkait penurunan emisi seperti Perdana Menteri Inggris, medesak Australia untuk melakukan pengurangan emisi lebih serius (Dziedzic, 2021). Pada nyatanya, fokus utama dari kebijakan luar negerinya tidak hanya sekotr lingkungan melainkan juga pada perdagangan internasional (Dziedzic, 2021). Namun pengurangan emisi di Australia cukup mendapatkan banyak desakan sehingga menjadikan Scott Morrison menerapkan kebijakan tersebut dan lebih mulai peduli terhadap aksi lingkungan.

Serta penting untuk dicatat bahwa isu lingkungan tidak hanya mencakup pada kebakaran hutan saja. Australia memiliki sejumlah kerusakan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara, kebakaran hutan dan masih banyak lagi (Kedutaan Besar Australia). Riset ini akan meneliti seluruh kebijakan Scott Morrison untuk mitigasi kerusakan lingkungan. Dan juga sebagaimana penting untuk diketahui bahwa keadaan lingkungan Australia yang sudah semakin memburuk terlebih dari hasil emisi batu-bara dan dengan adanya kebakaran hutan. *CSIRO* mencatat bahwa dari tahun 1990an hingga tahun 2019-2020 persentase kebakaran hutan di Australia juga semakin meningkat dari 350% menjadi 800% (Garry Cook, 2021)

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa pemerintahan Scott Morrison memilih untuk memprioritaskan kebijakan mitigasi kerusakan lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mengapa Scott Morrison memilih untuk memprioritaskan kebijakan mitigasi kerusakan lingkungan?
2. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang di keluarkan oleh Pemerintah Scott Morrison guna memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi di Australia.

3. Untuk mengetahui aksi apa saja yang dilakukan oleh Scott Morrison guna melakukan mitigasi kerusakan lingkungan

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana peran pemerintah Australia dalam pemulihan kerusakan lingkungan pada era Scott Morrison. Pada saat masa jabatan Scott Morrison berlangsung, Australia dilanda kebakaran hutan yang terbilang cukup besar hingga dampaknya dirasakan oleh beberapa negara di sekitar Australia. Serta untuk mengetahui adakah kebijakan yang berubah sejak kepemimpinan yang lalu dengan era Morrison ini. Awal mula terjadinya kasus ini ialah karena cuaca ekstrim yang melanda Australia. Sehingga menyebabkan suhu panas yang meningkat, hingga memicu kebakaran hutan yang cukup memberikan keresahan pada warga sekitar yang tinggal di permukiman hutan. Ini seharusnya menjadi tugas negara untuk lebih memperhatikan negaranya yang tengah dilanda bencana tersebut. Fokus utama dalam penulisan ini ialah melihat tanggapan apa yang diberikan oleh pemerintah Australia dalam mitigasi kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dengan luas hampir berkisar 10,3 juta hektar lahan mengakibatkan asap dari kebakaran hutan tersebut membubung ke udara. Asap yang dihasilkan juga melintasi kota-kota di AS di mana asap ini telah membubung tinggi melintasi area Pasifik (Rahajeng Kusumo Hastuti, 2020). Penelitian ini juga akan melihat tanggapan yang diberikan oleh Perdana Menteri Australia dalam menanggapi negara-negara yang menjadi korban dari asap kebakaran hutan. Pada tahun 2018 terjadi pergantian Perdana Menteri, sebagaimana beberapa kebijakan mengalami

perubahan. Terlebih kebakaran yang terjadi di tahun 2019 merupakan kebakaran hutan terbesar dengan memakan korban yang cukup banyak pula.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kebakaran hutan yang terjadi di Australia yang terjadi dari alam sendiri Pada bagian tinjauan Pustaka ini, saya sebagai penulis mencoba meninjau dari buku yang berjudul *“Bushfires in Australia: a serious health emergency under climate change”* yang ditulis oleh Michael J Abramson bersama beberapa temannya Yu dan Rongbun Xu guna meninjau paper yang akan saya kerjakan. Pada salah satu bagian di dalam buku ini, author dari buku tersebut mengatakan bahwa akibat dari kebakaran hutan yang terjadi di Australia bahwa paling sedikit lahan yang terbakar di area New South Wales itu memakan 2,7 hektar (Yu & Rongbun Xu, 2020). Menurut saya sendiri ini terbilang cukup serius karena 2,7 hektar lahan bukanlah lahan yang sedikit (Yu & Rongbun Xu, 2020). Di dalam literatur tersebut juga mengatakan bahwasannya perubahan iklim yang menjadi tingkat tertinggi Australia kehilangan hutan hijau mereka. Beberapa titik api yang menyebar hingga ke beberapa negara bagian seharusnya menjadi perhatian Scott Morrison. Asap yang ditimbulkan dari 2,7 hektar lahan yang terbakar dan membumbung tinggi di atmosfer itu tidak hanya mengancam negara-negara bagian tetangga Australia saja. Melainkan dapat berpengaruh ke negara-negara yang bahkan letaknya jauh dari Australia.

Pada bahan bacaan lainnya yang saya tinjau dengan judul *“Analisis Terhadap Kegagalan Usulan Kebijakan Lingkungan Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS) di Parlemen Australia Pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd*

Tahun 2007-2010” yang ditulis oleh Brilliane dengan kedua temannya yaitu Ayudya Areom dan Septyanto Prakoso. Pada literatur ini memang tampak cukup jauh dengan masa kebakaran hutan yang terjadi di Australia pada tahun 2018-2020. Tetapi pada literatur ini, menjelaskan bahwa sebenarnya Australia pada masa Kevin Rudd tampak lebih sigap dalam menangani kasus environment yang terjadi di Australia itu sendiri. Pada jurnal tersebut, mengatakan bahwa Kevin Rudd mengusulkan sebuah kebijakan tersebut untuk mengurangi gas emisi rumah kaca yang ada di Australia (Brilliane & Septyanto Galan Prakoso). Disini jelas terlihat perbedaan antara Kevin Rudd dengan Scott Morrison, sebagaimana Kevin Rudd tampak lebih fokus pada apa yang terjadi dengan lingkungannya.

Pada tinjauan literatur selanjutnya, banyaknya faktor lain yang mengakibatkan Morrison mengalami hambatan menangani kasus kebakaran hutan. Ratusan ribu nyawa yang telah hilang akibat kebakaran tersebut. Hanya sukarelawan yang bergerak mempertaruhkan nyawa mereka untuk memadamkan api yang membakar kawasan tersebut (Singh, April 2020). Pernyataan tersebut dilansir dari literatur dengan judul “Case Study on 2019 Australian Bushfire.” yang ditulis oleh Singh dan Aishwarya. Australia juga mendapat bantuan dari negara federal lainnya yang mana untuk membantu memadamkan dan memberikan bentuk evakuasi untuk para korban yang terdampak (Singh, April 2020).

Sebagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi di Australia menjadikan penulis mengangkat jurnal literatur sebagai tinjauan pada penelitian ini, dengan judul jurnal ialah “*Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security*” yang di tulis oleh Martanto, di mana dengan kasus kebakaran hutan yang terjadi di Australia cukup memberikan dampak

buruk bagi lingkungan Australia bahkan hingga terasa pada negara di sekitar Australia, sehingga menjadikan penulis untuk mengangkat Environmental Security untuk memperkuat penelitian ini. Ini sudah menjadi ciri khas utama dalam Environment Security dalam memberikan fokus baik itu perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkup lingkungan secara umum (Martanto, 2007)

Dari beberapa referensi yang sudah penulis sertakan di atas, tampak Australia terdampak kerusakan alam yang cukup serius akibat dari kebakaran hutan. Pemerintahan Australia sudah seharusnya tanggap akan kerusakan lingkungan ini sebagaimana hutan Australia termasuk dalam jajaran sepuluh hutan terbesar di dunia. Namun melihat posisi Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal dan cenderung fokus terhadap sistem perekonomian menjadikan isu lingkungan yang terjadi di Australia kurang mendapat perhatian. Itu sebabnya penulis akan mengkaji peran Pemerintahan Scott Morrison dalam menanggapi kerusakan lingkungan dan dikaitkan dengan teori Decision Making oleh William

D. Coplin sebagai pembeda antara penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan konsep dari *Decision Making* yang dikemukakan oleh *William D. Coplin* pada bukunya yang berjudul "*Introduction to International Politics*", sebagai suatu bentuk pendekatan sebagaimana untuk menjelaskan dari studi kasus yang penulis pilih yaitu Mengapa Scott Morrison memutuskan untuk berkontribusi dalam pemulihan kerusakan lingkungan. Pada penjelasan *Decision Making* ini *William D. Coplin* menjelaskan bahwa Decision Making sebenarnya dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor

Politik Domestik, faktor Ekonomi dan Militer, dan faktor Internasional. Yang mana masing-masing dari faktor tersebut memiliki aspek masing-masing dalam membuat suatu kebijakan. Namun aspek dari masing-masing tersebut tentu pada akhirnya akan membentuk suatu kerangka dari kebijakan yang dibuat. Ada pun ketiga penjelasan faktor sebagai berikut;

a. Faktor Politik Domestik

Di dalam faktor politik domestik yang dikemukakan oleh *William D. Coplin* pada teori nya *Decision Making* ini termasuk salah satu bentuk pengaruh yang cukup besar dalam suatu pembuatan kebijakan luar negeri. Faktor domestik ini mendapat tugas sebagaimana mereka yang memberikan izin atas penyamarataan terhadap lintas negara (Coplin, 1974). Faktor politik domestik ini juga sebenarnya masuk dalam kategori aktor yang mana untuk memberikan suatu bentuk atau jalan dari sebuah bentuk interaksi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dengan policy influencers (D.Coplin, March 1974). Faktor politik domestik ini juga lebih berfokus pada bidang isu-isu kebijakan luar negeri serta juga pada beberapa bagian negara. Pada politik domestik ini juga terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam menjalankan suatu politik domestik guna membuat suatu kebijakan luar negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu seperti birokrasi, partai politik, kelompok yang berkepentingan serta media massa (D.Coplin, March 1974). Yang mana tentu masing-masing faktor ini bergerak pada bidangnya masing-masing guna menghasilkan suatu kebijakan luar negeri.

b. Faktor Ekonomi dan Militer

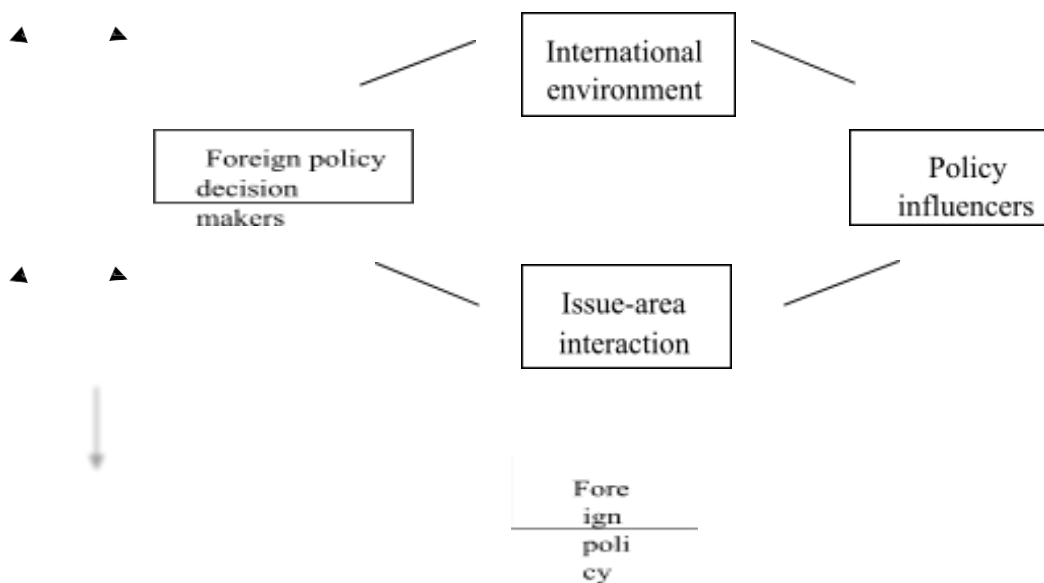
Pada teorinya mengenai pembuatan kebijakan, di mana William D. Coplin ini menjelaskan faktor lainnya yang sangat berpengaruh terhadap suatu proses pembuatan kebijakan, yaitu pada bidang ekonomi dan militer. Ekonomi dan militer ini memiliki peran yang cukup kuat di dalam suatu negara yang mana ekonomi sangat berperan untuk memajukan pasar perekonomian suatu negara kepada dunia internasional. Sedangkan militer yang sangat berperan penting juga di mana suatu negara tentu memerlukan adanya bentuk pertahanan untuk menjaga suatu negara kalau ada serangan dari negara lain dan juga untuk menjaga sistem kedaulatan negara itu sendiri. Ekonomi dan militer itu sudah saling berhubungan sejak di masa kehidupan mediteranian. Sejak pada masa abad kesembilan saat itu konsep dari ekonomi dan militer sudah cukup melekat, di mana dulu pada zaman mediteranian ada suatu penguasa tanah untuk tempatnya melakukan perdagangan, namun untuk tetap menjaga utuhnya lahan sang pemilik mengirimkan armada serta untuk mengawasi lahannya dan juga untuk memenangkan perang dagang yang pada akhirnya sang penguasa lahan bisa mendapatkan sekutu dagang guna meningkatkan kualitas perekonomian di daerah sekitarnya (Coplin, 1974). Itu mengapa ekonomi dan militer saling bergantung bahkan dari zaman abad kesembilan dulu, sebagaimana juga akan sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

c. Faktor Internasional

Sementara untuk faktor Internasional ini sendiri tentu lebih mencangkup pada jajaran yang lebih luas lagi yaitu memicu pada konteks

dunia internasional sebagaimana tentunya akan memberikan suatu bentuk interaksi internasional baik itu dari segi Kerja sama maupun dari segi membuat suatu kebijakan. Maka dari itu faktor Internasional ini sebenarnya sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Keadaan suatu negara yang saling berpengaruh terhadap negara lainnya tentu menjadi konteks utama dalam faktor Internasional. Namun demikian juga hubungan internasional juga tak luput dari permasalahan antara kedua negara atau lebih yang saling berhubungan serta dengan keadaan ekonomi-militer yang ada akan sangat mempengaruhi keputusan pada konteks internasional ini (Coplin, 1974).

Gambar 1. The Foreign Policy Decision-Making Process



Sumber: Buku “*Introduction to International Politics*”, oleh *William D. Coplin*, Edisi Kedua (Coplin, 1974).

Maka dari itu dalam penelitian ini memilih konsep yang dikemukakan oleh *William D. Coplin* guna menyelesaikan karya tulis ini. Tepatnya penulis akan menggunakan teori *Decision Making* pada konsep Internasional sebagai kerangka pemikiran penelitian ini. Dampak kebakaran

hutan yang serius dapat menimbulkan perubahan iklim semakin memburuk dan merugikan negara-negara tetangga. Serta kerusakan lingkungan di Australia tidak hanya terjadi akibat kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2019-2020 saja. Melainkan lingkungan Australia sudah seharusnya membutuhkan penanganan khusus dengan melihat jumlah emisi yang tercemar dari hasil industri batu-bara. Tingginya persentase kebakaran hutan pada tahun 2019-2020 mendorong perlunya pembentukan kebijakan yang didasarkan pada catatan kejadian tersebut. Sebagaimana persentase kebakaran hutan dari tahun 1990 hingga 2019-2020 mengalami kenaikan (Garry Cook, 2021). Tentu hal ini akan menjadikan terbentuknya suatu interaksi internasional antar negara hingga terciptanya suatu kebijakan internasional.

1.7 Argumen Sementara

Pemerintah Australia di bawah kepemimpinan Scott Morrison memutuskan berkontribusi dalam pemulihan kerusakan lingkungan karena setelah mendapat desakan dari para warga negaranya sendiri dan juga oleh beberapa negara lain, melihat kondisi alam Australia yang sungguh memerlukan perhatian pemulihan dari kebakaran hutan yang terjadi di penghujung tahun 2019-2020 silam. Terjadinya kebakaran hutan ini sungguh memberikan dampak bagi untuk masyarakat Australia sendiri, negara-negara yang bersebelahan dengan Australia yang bahkan dampak ini juga dirasakan oleh pemerintahan Scott Morrison sendiri. Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal yang setelah mendapat desakan akibat kerusakan lingkungan, ia tidak memiliki cara lain selain memperhatikan kondisi lingkungan di era masa jabatannya berlangsung. Hal ini tentu memberikan

dampak kepada era pemerintahannya sebagaimana Scott Morrison yang berfokus dengan pertumbuhan ekonomi negara dan harus memulihkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan yang terjadi. Kebakaran hutan yang terjadi di Australia pada akhirnya memberikan efek yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Australia, baik itu domestik hingga ke dunia Internasional sebagaimana dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan guna memulihkan kerusakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Scott Morrison juga berpengaruh terhadap sistem perekonomian yang tengah berlangsung selama masa jabatannya dan cukup dirasakan hingga ke beberapa negara sekitar yang menjadikan ini adalah konteks internasional.

Melihat apa yang tengah terjadi di Australia dan sikap Morrison yang tampak tidak andil dalam menangani permasalahan sosial, tentu menjadikan dirinya mendapatkan teguran dari warganya sendiri bahkan menjadi perbincangan internasional. Pada kebakaran hutan yang melanda Australia dan cukup banyak memakan korban jiwa, namun media yang menemukan bahwa Scott Morrison tengah melakukan liburan ke luar negeri pada saat Australia tengah terjebak dengan kebakaran hutan dan dampaknya yang dirasakan hingga ke New Zealand. Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan besar bagi para masyarakat khususnya bagi mereka yang terkena dampak cukup serius akibat kebakaran tersebut. Dan pada akhirnya masyarakat melakukan aksi terkait kerusakan lingkungan serta negara tetangga yang merasakan dampaknya juga, menjadikan Scott Morrison pada akhirnya memulai langkahnya guna memperbaiki kerusakan lingkungan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terkait lingkungan serta mengirimkan beberapa armada untuk bantu menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi. Tampak Scott Morrison yang dengan perlahan memulai untuk turut serta dalam menanggulangi kerusakan

lingkungan. Melihat dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan serta tambah dengan efek industry batu bara sangat memberikan efek yang cukup serius di mana tidak hanya warga Australia saja yang merasakannya melainkan hingga dirasakan pada beberapa negara, terlebih dengan New Zealand.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Untuk menciptakan suatu karya tulis dalam bentuk penelitian, akan sangat penting untuk mengetahui suatu data yang berguna untuk menyelesaikan dan mengetahui hasil dari penelitian yang diajukan. Disini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif pada karya tulis ini sehingga penulis bisa memberikan gambaran dan mendalami tentang pengaruh serta bahayanya asap yang ditimbulkan dari kebakaran yang melanda Australia serta bisa mempengaruhi negara yang berada di luar Australia. Hal ini dikarenakan bahwa asap yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan bisa saja menyebar secara cepat dan mencemari lingkungan yang dampaknya akan dirasakan oleh beberapa negara di sekitar kawasan Australia.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dengan adanya kebakaran hutan yang melanda kawasan Australia yang menyebabkan tak sedikitnya negara-negara bagian yang terancam akan Kesehatan udara sehingga percikan api yang bisa saja merambat sewaktu-waktu ke permukiman yang tinggal di sekitaran hutan di Australia. Ini yang seharusnya menjadi perhatian utama dari pemerintah Australia untuk lebih peduli dengan keadaan yang sangat mencekam itu. Asap yang telah mencapai pada kawasan

Amerika Latin tentunya akan membuat permasalahan baru antara Australia dengan Amerika jika tidak secepatnya ditangani (Rahajeng Kusumo Hastuti, 2020). Subjek yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah pemerintah Australia dengan respon pemerintah Australia terhadap kebakaran hutan yang melanda sebagai objek dalam penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan literatur ini, metode yang digunakan adalah bersifat Deskriptif. Analisis yang digunakan untuk mengerjakan penelitian ini ialah dengan mengumpulkan riset yang ada dengan berbahan dasar atau bahan bacaan berupa buku, jurnal, dan masih banyak lagi di mana dengan berdasarkan kesetaraan dengan apa yang terjadi seperti di judul.

1.8.4 Proses Penelitian

Untuk mempermudah gambaran dalam tahap penulisan ini, maka penulis akan membagi dalam beberapa tahap untuk menjelaskan apa yang sebenarnya pemerintah tanggapi dengan kasus kebakaran hutan di Australia yang sebagaimana asap yang dihasilkan telah membumbung melintasi kawasan di sekitarnya. Beberapa bagian itu ialah yang nantinya akan dilakukan dengan masing-masing pembagian; seperti misalnya pada Bab I yang menjelaskan latar belakang dan sebagainya. Begitu pun pada Bab II yang membahas terkait dua partai besar di Australia dan Bab III yang membahas terkait aplikasi teori dengan studi kasus dan diakhiri Bab IV yang akan menjadi penutup dari penulisan ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian ini dijabarkan menjadi empat bab, yaitu:

- Bab pertama akan menjelaskan serangkaian tentang latar belakang studi kasus, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab kedua, penulis melakukan penjabaran terkait dua partai besar yang ada di Australia yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh.
- Bab ketiga, pada bab ini penulis melakukan pengaplikasian teori dari William D. Coplin sebagai menyelesaikan studi kasus yang penulis pilih.
- Bab terakhir, penulis menyimpulkan dan memberi saran sebagaimana untuk merangkum dari penulisan ini serta bisa berguna pada penelitian di masa depan.

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI SCOTT MORRISON

Bab II ini akan melihat bagaimana kebijakan luar negeri Scott Morrison. Selama dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, ia memfokuskan kebijakan luar negerinya pada dua sektor yaitu ekonomi dan lingkungan.

Australia merupakan salah satu negara yang memiliki sebutan sebagai paru-paru dunia (Butler, 2020). Dengan luas hutan yang cukup besar, dampak dari kebakaran hutan sangat dirasakan oleh beberapa negara di sekitar Australia. Australia yang kerat mendapatkan julukan di atas, penting untuk menjaga eksistensi dari keadaan lingkungan. Hal tersebut menjadi perbincangan Internasional ketika paru-paru dunia mengalami kerusakan yang dampaknya dirasakan hingga ke Negara di sekitarnya. Terlebih pada tahun 2018 terjadi pergantian Perdana Menteri dan kebakaran ini terjadi pada saat Scott Morrison mulai menjabat. Perdana Menteri Scott Morrison merupakan perwakilan dari Partai Liberal. Partai tersebut tidak terlalu memfokuskan aspek dari keadaan lingkungan namun lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomian serta inovasi negara (Barry, 2018). Walaupun isu lingkungan penting untuk dibahas, namun Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal berfokus pada sistem perekonomian saja. Hal ini menjadikan isu lingkungan terbelakangkan yang sebenarnya saat itu keadaan lingkungan Australia sangat memerlukan perhatian khusus. Penting untuk tetap menjalankan kestabilan ekonomi, namun penting juga untuk melihat keluar bahwasannya ada kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian.

Kebijakan Luar Negeri Scott Morrison

Australia telah banyak disinggung dari beberapa negara untuk menurunkan emisi karbon. Dikarenakan Australia termasuk dalam sebuah jajaran penyumbang emisi gas karbon. Australia menduduki peringkat ke-14 dalam penghasil emisi terbesar (Australian Government, 2020). Pada saat Scott Morrison menjabat sebagai kepala pemerintahan, saat itu Australia dilanda kebakaran yang cukup besar. Tidak sedikit rumah warga yang hangus terbakar, bahkan satwa liar juga turut menjadi korban. Tak hanya itu, dampak yang ditimbulkan juga akan berpengaruh besar pada pencemaran udara sehingga kebakaran ini sangat berdampak besar. Ini tentu seharusnya menjadi kekhawatiran pada Scott Morrison selaku Perdana Menteri. Dampak yang ditimbulkan cukup dirasakan warga Australia, bahkan hingga ke Negara di sekitarnya yaitu New Zealand. Akan tetapi, Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal, isu kerusakan lingkungan seperti ini bukanlah hal prioritas baginya. Selaku perwakilan Partai Liberal dari faksi *dry*, isu perekonomianlah yang menjadi tujuan utamanya. Australia mendapat teguran dari dunia Internasional sebagaimana pada perjanjian Paris Agreement, Australia berkomitmen untuk mengurangi emisi 26%-28% pada tahun 2030 mendatang (Australian Government, 2020).

Pengurangan emisi merupakan suatu proyek serius yang mana akan dipertanyakan pada tahun 2030 mendatang. Namun, dengan melihat Scott Morrison berasal dari Partai Liberal, kebakaran hutan bukanlah fokusnya. Walaupun kebakaran yang terjadi cukup berdampak hingga ke Negara sekitar. Artinya, kerusakan lingkungan Australia terbilang cukup serius. Disini terlihat bahwa Scott Morrison yang berasal dari partai Liberal cukup tidak memfokuskan pada isu

lingkungan yang ada. Terlebih Scott Morrison ditemukan berlibur ke luar negeri tepat pada terjadinya kebakaran di Australia belum terselesaikan (Kinasih, 2022). Morrison malah menanggapi bahwa kebakaran hutan merupakan hal yang lazim terjadi di Australia (Kinasih, 2022). Ini dapat dilihat bahwa dalam bentuk pemerintahannya Morrison, memperlihatkan seakan-akan Australia belum bisa terlepas dari sistem perekonomian bebas. Yang pada nyatanya memang industri batubara lah yang merupakan perekonomian Australia yang memberikan hasil cukup besar.

Pada pidatonya sebelum acara KTT G7 yang, Scott Morrison menyerukan beberapa terkait kebijakan luar negerinya. Perdana Menteri Australia tersebut menjelaskan bahwa fokusnya akan kebijakan luar negeri ialah pada perdagangan internasional dan kebijakan iklim (Dziedzic, 2021). Scott Morrison pada akhirnya menegaskan terkait kebijakannya yang berfokus pada kedua sektor tersebut. Dirinya yang berasal dari Partai Liberal, mengharuskan dirinya untuk menerapkan kebijakan mitigasi lingkungan di Australia. Mengingat keadaan lingkungan Australia yang cukup membutuhkan perhatian serta keadaan global saat ini tengah menganut sistem perekonomian emisi (Dziedzic, 2021). Terlebih tidak sedikit yang menekan Australia untuk melakukan penurunan emisi, menjadikan isu lingkungan masuk kedalam Kebijakan Luar Negeri nya. Serta berdasarkan pada pidatonya menjelang pertemuan KTT G7 tersebut bahwa Scott Morrison juga berfokus pada perdagangan internasional. Hal ini sangat dibatas wajar dikarenakan Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal tentu sektor perekonomian menjadi fokus utamanya. Sebagaimana Perdana Menteri Australia itu menginginkan adanya reformasi terhadap *World Trade Organization* atau *WTO*. Morrison mendesak

untuk melakukan reformasi setelah Trump menuduh organisasi tersebut telah melakukan tindakan diskriminasi kepada pihak Amerika Serikat (Dziedzic, 2021).

Saat semasa kampanye nya berlangsung, Scott Morrison menjanjikan untuk melakukan net zero emission pada tahun 2050 mendatang (Australian Government, 2020). Namun pernyataannya tersebut mendapat kritik sebagaimana Scott Morrison kurang teliti dalam memberikan informasi terkait teknologi yang digunakan. Dan tepat disaat dirinya menjabat, Australia dilanda kebakaran yang cukup memberikan dampak serius, baik pada makhluk hidup maupun lingkungan. Badan *Bureau of Meteorology* juga telah mengatakan bahwa efek dari kebakaran hutan ini sangat berdampak pada perubahan iklim (Australian Government, 2020). Hal ini menjadi desakan bagi Scott Morrison yang mana ia berasal dari Partai Liberal.

Sikap Morrison terbilang cukup tidak peduli sehingga menyebabkan banyaknya kritikan yang ia dapatkan. Warga Australia meminta bahwasannya Scott Morrison bisa untuk mempedulikan dengan apa yang sedang terjadi pada lingkungan sekitar.. Sudah semestinya pemerintah Australia untuk menangani kasus ini dengan serius. Tidak hanya memandang perspektif perekonomian saja namun juga dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan kepada sistem lingkungan.

Australia merupakan salah satu negara pengekspor batu-bara terbesar, tentunya membantu untuk menambahkan gas emisi dan tentu mencemari udara. Namun itu semua adalah fokus utama perekonomian Australia, dapat dikatakan bahwa ekonomi dan lingkungan saling bertentangan. Itu sudah menjadi hal lumrah bahwa dengan angka perekonomian yang cenderung stabil tentu ada sektor lingkungan yang harus dikorbankan. Maka dari itu pemerintah harus

mempertimbangkan semua dampak yang ditimbulkan sebagaimana ini akan berpengaruh juga kepada Kesehatan bagi seluruh manusia (Siahaan, 2020).

Scott Morrison menjanjikan kepada badan National Bushfire Recovery Agency dengan memberikan dana sebesar 2 Miliar AUD atau sama dengan 1.4 Miliar USD (Australian Government, 2020). Dana yang diberikan oleh Scott Morrison tersebut nantinya akan digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Sebagaimana bisa membantu dalam penerapan kebijakan luar negerinya terkait perubahan iklim.

Perekonomian Australia yang sebagian besar berasal dari tambang batu- bara, sebenarnya menjadikan Australia tidak bisa memberhentikan ekspor tersebut. Pemerintah Australia akhirnya mulai memperhatikan keadaan lingkungan dengan menerapkan beberapa kebijakan kepada perusahaan terkait penurunan emisi. Ini merupakan langkah yang benar dalam proses mitigasi kerusakan lingkungan di Australia. Dan agar bisa menepatkan janji sesuai perjanjian yang di tetapkan di Paris Agreement terkait penurunan emisi di tahun 2030 mendatang (Australian Government, 2020). Hal ini menjadikan sektor lingkungan dan ekonomi sebenarnya saling berkaitan.

Selain tambang batu-bara, sebenarnya ada alternatif lain yang bisa digunakan dan lebih ramah lingkungan. Pemerintah bisa mulai mengalihkan bahan bakar batu-bara menjadi tenaga listrik. Dengan begitu, bisa sedikit mengurangi emisi yang dihasilkan dari proses penambangan batu-bara. Namun tentu angka perekonomian akan mengalami perubahan, sebagaimana Australia sangat bergantung pada tambang batu-bara tersebut. Ini merupakan langkah awal untuk melakukan proses mitigasi kerusakan lingkungan. Jikalau diterapkan dengan baik

dan benar setidaknya sektor perekonomian dan lingkungan mendapatkan kesetaraan. Sebagaimana proses pengiriman dan penjualan bahan bakar tetap berlangsung namun perlu memperhatikan jumlah emisi yang mereka timbulkan.

Pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan untuk melakukan proses mitigasi, namun pemerintah juga harus mengontrol beberapa hal. Beberapa hal yang harus diperhatikan ialah terkait pendanaan, pengelolaan, serta koordinasi terkait situasi iklim (Australian Government, 2020). Sehingga pemerintah bisa mengeluarkan dana seefisien mungkin dan mulai memperhatikan situasi lingkungan yang sedang terjadi. Scott Morrison mulai membenahi terkait kasus kerusakan yang tengah terjadi. Bagaimanapun, itu sudah menjadi tugasnya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan melihat kebakaran yang terjadi di tahun 2019 silam. Tepatnya pada masa ia menjabat merupakan kebakaran yang terbilang cukup besar. Walaupun fokusnya yang berada pada bidang perekonomian, Scott Morrison akhirnya mengeluarkan kebijakan lingkungan guna melakukan proses mitigasi, yang ia terapkan kepada dunia perekonomiannya.

BAB III

APLIKASI TEORI

Setelah pemaparan terkait dua Partai di Australia, pada Bab III ini penulis akan mengaplikasikan teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin, yaitu Decision Making, untuk menjawab rumusan masalah. Permasalahan lingkungan yang terjadi di Australia berdampak hingga ke New Zealand, hal ini cukup memberikan adanya interaksi Internasional. Dapat dilihat bahwa selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi hubungan antar Negara.

Penting untuk diketahui bahwa tidak hanya faktor ekonomi ataupun militer saja yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya keadaan suatu Negara. Faktor lingkungan juga memainkan peran dalam mempengaruhi suatu negara. Namun jika salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan antar Negara terancam, tentu akan memberikan dampak pada kedua pihak. Pertumbuhan ekonomi dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap suatu Negara, akan tetapi dampak dari pertumbuhan ekonomi mengakibatkan keadaan lingkungan terancam. Dalam upaya mencapai target pasar, tidak sedikit gas beracun yang dikeluarkan ke lapisan ozon dari proses pencapaian angka perekonomian. Dampaknya akan dirasakan oleh seluruh ekosistem di permukaan bumi karena kerusakan lingkungan. Perlu adanya kesadaran dan Kerjasama antar Negara untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Seperti yang dipaparkan oleh *William D. Coplin* terkait penjabaran mengenai *Decision Making*. Teorinya pada *faktor internasional* yang menjelaskan terkait *Ecological Settings*, sebagaimana faktor ini juga dapat mempengaruhi interaksi antar negara (D.Coplin, March 1974). Tidak hanya membicarakan faktor

pertumbuhan ekonomi maupun gerakan militer, namun permasalahan lingkungan juga penting untuk dibahas.

Seperti yang dipaparkan oleh *William D. Coplin* terkait penjabaran mengenai *Decision Making* di mana pada teorinya bagian *International Interaction* menjelaskan terkait *Ecological Settings*, sebagaimana faktor ini juga dapat mempengaruhi interaksi antar negara (D.Coplin, March 1974). Namun sebelum itu, penulis akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan menurut William D. Coplin. Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yaitu ada faktor politik domestik, faktor ekonomi dan militer, serta ada faktor dari international.

3.1 Politik Domestik

Teori Decision Making yang dibedakan menjadi tiga faktor yaitu salah satunya faktor Politik Domestik. Politik Domestik merupakan suatu aspek yang sangat berpengaruh dalam menciptakan suatu pembuat keputusan. Politik Domestik merupakan suatu sistem negara yang mana hadir untuk memberikan interaksi pada pembuat kebijakan dengan masyarakat. Dengan melihat bahwa keadilan masyarakat menjadi tujuan utama terbentuknya suatu kebijakan (D.Coplin, March 1974). Ada beberapa bagian yang berperan dalam Politik Domestik ini. Beberapa bagian tersebut ada birokrasi, anggota partai, kelompok dan media massa. Masing-masing dari bagian tersebut memiliki peran sendiri dalam menciptakan suatu kebijakan. Ada pula masing-masing peran penting yang terlibat dalam menjalankan suatu Politik Domestik, yakni:

3.1.1 Birokrasi

Dalam menciptakan suatu kebijakan tentu sistem pemerintahan memiliki peran penting, seperti halnya birokrasi. Birokrasi sangat berperan dalam menjalankan politik domestik yang mana nantinya akan tersalurkan untuk membuat suatu kebijakan. Birokrasi sendiri merupakan suatu sistem pemerintah dengan peran yang sangat mempengaruhi terciptanya dari sebuah bentuk kebijakan. Pada teori yang dikemukakan oleh William D. Coplin sebagaimana pada birokrasi sendiri terdapat sebuah pihak *Bureaucratic Influencer*. *Bureaucratic Influencer* ini sendiri merupakan salah satu pemberi kebijakan yang ada di semua negara modern dan berasal dari lembaga eksekutif negara (D.Coplin, March 1974). Maka dari itu dalam menjalankan pemerintahan di Australia guna mengambil keputusan tentu sangat bergantung pada sistem birokrasi yang ada.

Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO)

Dalam menjalankan sistem pemerintahan sebagaimana birokrasi cukup berperan penting untuk sistem politik domestik. Seperti *Commonwealth Scientific and Industrial Research* yang bekerja dalam naungan pemerintahan dengan fokus mereka pada bidang lingkungan. *CSIRO* bekerja sama dengan pemerintah guna menemukan sebuah solusi untuk menangani tantangan yang ada di Australia seperti pada lingkungan (CSIRO, 2023). Dan *CSIRO* juga bekerja di bawah *Undang- Undang Riset Sains dan Industri pada tahun 1949*, serta dalam proses

pembuatan kebijakan *CSIRO* tidak memiliki kewenangan langsung. Akan tetapi peran kontribusinya seperti dengan memberi solusi kepada pemerintah dalam membuat suatu kebijakan (*CSIRO*, 2023). Seperti kebakaran hutan yang terjadi di Australia sebagai organisasi yang bergerak pada sektor lingkungan, *CSIRO* melakukan tugasnya untuk berpengaruh dalam pembuatan suatu kebijakan. Bertanggung jawab atas pemberian informasi terkait isu yang terjadi, sebagaimana nantinya akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. ((masukin dah tu solusi apa aja yang di kasih csiro waktu kebakaran hutan. Now kam cari di web about that, udah ada kan web nya))

Sejak 25 tahun lalu, kebakaran hutan yang terjadi di Australia semakin meningkat. Tepatnya pada tahun 1990an, saat itu Australia sendiri sangat jarang terjadi sebuah kebakaran hutan (*Garry Cook*, 2021). Berdasarkan data yang di ambil dari satelit pada tahun 2002-2018 *CSIRO* menemukan bahwa persentase kebakaran hutan yang terjadi di Australia mencapai 350% (*Garry Cook*, 2021). Dan seiring berjalanya waktu, *CSIRO* menemukan sebuah peningkatan persentase dari hasil kebakaran hutan yaitu sebesar 800% pada tahun 2019-2020 (*Garry Cook*, 2021). Dapat dilihat persentase kebakaran hutan semakin bertambah, terlebih peningkatan tersebut cukup signifikan. Maka dari itu pentingnya untuk melakukan proses mitigasi kerusakan lingkungan ini.

Seorang ilmuwan yang bekerja di *CSIRO* mengatakan bahwa untuk membuat suatu pengambilan keputusan ia memulai untuk

mengembangkan suatu model kebakaran dari berbagai kompleksitas (Amy Edwards, 2021). Model ini berperan dalam mengintegrasikan data terkait perambatan api untuk mengidentifikasi solusi pencegahan kebakaran hutan. Seperti itulah peran CSIRO dalam membantu untuk mewujudkan suatu kebijakan. Mengingat seiring berjalannya waktu, persentase kebakaran yang semakin meningkat sehingga diperlukannya proses mitigasi tersebut.

3.1.2 Kelompok Partai Politik

Kelompok Partai Politik sendiri merupakan kelompok anggota politik yang memiliki kuasa untuk memberikan gagasan politik. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Partai Politik juga turut memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan.

Wilayah Australia sendiri terdapat beberapa Partai namun ada tiga Partai besar yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Australia (Parliament of Australia, 2022). Tiga Partai tersebut yaitu Partai Liberal, Partai Buruh dan Partai Nasional (Parliament of Australia, 2022). Partai Liberal merupakan sebuah Partai dengan sistem politik mengarah pada sayap kanan dan tengah. Lalu ada Partai Buruh yang merupakan partai tertua di Australia berdiri pada tahun 1901 (Parliament of Australia, 2022). Dan ada Partai Nasional yang dibentuk pada tahun 1920 namun seiring berjalannya waktu Partai ini banyak mengalami perubahan nama (Parliament of Australia, 2022).

Scott Morrison merupakan Perdana Menteri Australia yang berasal dari Partai Liberal dengan fokus utamanya sistem perekonomian. Sesuai

dengan arah politik dari Partai Liberal yang berada pada sistem politik sayap kanan tengah kanan moderat. Seperti halnya dengan salah satu pimpinan pemerintahan Australia yaitu Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal. Tentu saat ia menjabat, Scott Morrison tampak kurang bertindak tegas dalam menanggapi kasus lingkungan. Saat kebakaran hutan berlangsung Scott Morrison tengah menjabat sebagai Perdana Menteri. Scott Morrison berasal dari faksi *Dry Liberal* yang memiliki sifat condong ke kiri. *Dry Liberal* sendiri ialah kumpulan orang-orang yang berfokus pada sistem perekonomian, baik itu perekonomian dalam negeri atau maupun internasional. Sedangkan faksi lainnya pada Partai Liberal yaitu ada *Wet Liberal* yang bersifat sedikit lebih terbuka dari sistem perekonomian. Namun faksi ini tetap berada pada sayap kiri, hanya saja orang-orang yang berada pada faksi ini cenderung bisa melihat keluar dari sistem perekonomian. Faksi *Wet Liberal* ini lebih terbuka dari *Dry Liberal*, yang mana faksi ini bisa melihat ke bagian kanan. Namun *Wet Liberal* masih tetap menjaga kebebasan individu sebagai bagian dari Partai Liberal itu sendiri. Melihat Scott Morrison yang berasal dari faksi *Dry liberal* cukup masuk akal baginya menutup mata terkait lingkungan di mana hanya fokus dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam menjalankan tugasnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang berasal dari Partai Liberal dengan fokusnya dibidang ekonomi negara, menjadikan ia harus melihat keluar dari lingkup partai itu saja, untuk melihat keadaan lingkungan seperti iklim yang berubah

pada masa jabatannya berlangsung akibat besarnya kebakaran hutan yang melanda sebagian wilayah di Australia. Dikarenakan Australia mendapat banyak teguran dari dunia internasional karena kebakaran hutan besar pada penghujung tahun 2019 silam yaitu pada saat Scott Morrison menjabat sebagai Perdana Menteri. Itu sebabnya ia mulai menerapkan kebijakan pada sektor perekonomian guna mitigasi kerusakan lingkungan di Australia. Scott Morrison mendapat teguran, baik dari dunia Internasional hingga warga Australia sendiri, Scott Morrison mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang ia keluarkan guna melakukan mitigasi dari kerusakan lingkungan.

Adapun beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan Scott Morrison sebagai berikut:

Tabel 1 – Kebijakan yang dikeluarkan oleh Scott Morrison.

No.	Nama Kebijakan	Keterangan
1	<i>The National Greenhouse and Energy Reporting Scheme</i>	Kebijakan seluruh perusahaan diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak pemerintahan terkait emisi yang ditimbulkan mulai dari sistem produksi serta konsumsi energi dari perusahaan mereka (Australian Government, 2020)
2	<i>The Safeguard Mechanism</i>	Kebijakan untuk membatasi emisi yang dikeluarkan dari beberapa fasilitas besar yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan besar (Australian Government, 2020)
3	<i>The Emission Reduction Fund (ERF)</i>	Kebijakan kepada pihak-pihak organisasi dan individu untuk dapat mendaftarkan proyek khusus guna mengurangi emisi mereka dan juga menerapkan seluruh perusahaan untuk menjual gas karbon yang dihasilkan oleh proyek tersebut kepada pihak pemerintahan (Australian Government, 2020)
4	<i>The Climate Active Carbon Neutral Standard</i>	Sertifikasi khusus untuk mengukur, mengurangi, serta untuk mengimbangi emisi yang mereka timbulkan (Australian Government, 2020)
5	<i>The Renewable Energy</i>	Kebijakan mewajibkan seluruh pengecer energi tenaga listrik agar dapat menyerahkan sejumlah sertifikat yang dibuat oleh pembangkit energi yang terbaru pada setiap tahunnya (Australian Government, 2020)

Pasca terjadinya kebakaran hutan di Australia dan ditambah dengan

produksi batu-bara yang masih terus berlangsung, Scott Morrison

mendapatkan banyak teguran. Teguran yang diberikan kepada Perdana Menteri Australia tersebut, diharapkan bisa untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan. Pada akhirnya setelah mendapat teguran, baik dari dunia Internasional hingga warga Australia sendiri. Tidak sedikit warga yang turun ke jalan untuk menekankan Scott Morrison agar memberhentikan penggunaan batu-bara guna memperbaiki kerusakan alam (BBC News Indonesia, 2020). Namun Morrison menyela bahwasannya kebakaran hutan terjadi akibat perubahan iklim dan sudah menjadi solusi global untuk menanggulangi permasalahan ini (BBC News Indonesia, 2020).

Sementara dengan Anthony Albanese berhasil meraih kemenangannya dengan menduduki sebanyak 73 kursi di Parlemen Australia dan mengalahkan Scott Morrison 51 kursi di Parlemen (Sorongan, 2022). Kemenangan Anthony Albanese dari Partai Buruh diharapkan dapat membuka jalan baru agar Australia bisa lebih efisien dalam menanggapi isu lingkungan. Albanese yang berasal dari Partai Buruh itu memberikan dukungan lebih kepada isu krisis iklim yang terjadi di Australia. Anthony Albanese juga mengatakan bahwa Scott Morrison tampak melakukan mitigasi tersebut namun tidak menjelaskan secara detail terkait model yang mereka gunakan (Martin, 2021). Janji Anthony Albanese terkait kenaikan target untuk menurunkan emisi menjadi 45% disetujui lebih dari sepuluh senator di Australia. (VOA Indonesia, 2022). Tidak hanya itu, Parlemen Australia pada akhirnya juga menerapkan RUU yang membahas terkait pengurangan emisi

(Associated Press, 2022). Serta Parlemen Australia juga memaksa industry batu-bara untuk menghemat emisi yang ditimbulkan sekitar 5% setiap tahunnya (Arif, 2023). Dan tentunya keputusan akan undang- undang ini pasti akan memberikan dampak yang besar bagi dunia perekonomian Australia. Pada nyatanya, Australia sangat bergantung dengan perindustrian batu-bara di dunia perekonomian mereka. Ini akan menjadi tantangan baru bagi para investor untuk lebih menerapkan kebijakan serta RUU yang sudah di loloskan. Ini tentunya menjadi pertanda di mana pemerintah Australia saat ini mulai gencar dan fokus terhadap perbaikan krisis iklim. Serta untuk menuju Australia bebas emisi pada tahun 2050 mendatang. Akan tetapi tentu di balik itu semua harus adanya pengorbanan dari beberapa sistem perindustrian ekonomi. Dunia perekonomian akan mendapatkan efek dari tekanan undang- undang yang telah disahkan tersebut. Tampak dari segi memperbaiki keadaan lingkungan, Anthony Albanese lebih tegas. Dengan mengeluarkan RUU khusus terkait iklim yang ada di Australia. Inti dari RUU tersebut yaitu memaksa para industri tambang batu-bara untuk mengekang emisi sebesar 5% untuk setiap tahunnya (Arif, 2023).

Awalnya Partai Liberal berkomitmen untuk melakukan target penurunan emisi yaitu dari 26%-28%, Partai Buruh juga meneruskan hal yang sama. Namun, Anthony Albanese menaikkan target penurunan emisi menjadi 43% (Turnbull, 2020). Mengingat atas apa yang terjadi di Australia pasca kebakaran hutan, kondisi lingkungan Australia cukup buruk, terlebih adanya industri batu-bara. Penting untuk memperhatikan

emisi yang ditimbulkan, sebagaimana Morrison juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mengurangi emisi.

3.1.3 *Kelompok yang Berkepentingan*

Jenis lainnya yang mempengaruhi suatu pembuat kebijakan ialah kelompok yang berkepentingan, William D. Coplin dengan teorinya Decision Making yang memiliki empat faktor guna membuat kebijakan. Sesuai dengan namanya bahwa Kelompok yang Berkepentingan merupakan aktor atau individu yang ada guna memberi pengaruh ataupun dukungan kepada pembuat kebijakan tanpa mengikut campuri kuasa pemerintah (D.Coplin, March 1974). Kelompok yang Berkepentingan itu sendiri bisa berdasarkan dari organisasi-organisasi Internasional seperti *Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council*.

Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council
Australasians Fire and Emergency Service Authorities Council

atau singkatnya *AFAC* merupakan suatu organisasi di Australia yang berada di bawah naungan pemerintahan (AFAC, 2018). AFAC merupakan organisasi yang bergerak pada bidang kebakaran serta layanan darurat di Australia dan Selandia Baru (AFAC, 2018). Strategi dari AFAC ini sendiri ialah untuk tindakan membantu pada proses pemulihan kebakaran hutan serta keadaan darurat. AFAC memiliki tugas untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dengan mendorong pengumpulan, pemantauan, dan pemanfaatan data yang relevan terkait dengan kasus yang sedang berlangsung (AFAC, 2018).

AFAC menyediakan informasi data terkait bantuan evakuasi hutan yang diberikan oleh berbagai negara. Beberapa data dari negara yang memberikan bantuan evakuasi kebakaran hutan di Australia ialah New Zealand sebanyak 320 pemadam kebakaran, Amerika Serikat sebanyak 360 tenaga, Canada sebanyak 239 tenaga (AFAC, 2018).

3.1.4 *Media Massa*

Faktor terakhir yang mempengaruhi sistem Politik Domestik yang dikemukakan oleh William D. Coplin ialah Media Massa. Media Massa adalah sarana yang berperan dalam akusisi distribusi informasi dan ditujukan kepada masyarakat melalui berbagai salurn seperti surat kabar, televisi, serta radio. Fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan untuk menyalurkan informasi dua arah (Harruma, 2022). Media Massa bisa memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan, karena menyebarkan informasi kepada khalayak masyarakat. Dan nantinya akan menimbulkan respon dari masyarakat terkait isu yang ada. Yang akan menyebabkan banyak masukan dari masyarakat untuk pemerintah terkait keputusan yang akan diambil nantinya.

Seperti halnya di Australia sendiri yang memiliki Media Massa dengan didanai oleh negara yaitu ada *Australian Broadcasting Corporation* atau *ABC* dan *Special Broadcasting Service* atau *SBS*. Media Massa *Australian Publish Corporation* sama dengan media lainnya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi

untuk *ABC* sendiri lebih terkenal dengan kualitas jurnalis nya yang terbilang cukup bagus (Blanco, 2023). Sedangkan dengan *Special Broadcasting Service* lebih bersifat terbuka yang multikultural di Australia. *SBS* juga memberikan tawaran dengan menayangkan informasi serta hiburan dengan multi bahasa bagi masyarakat yang tidak menggunakan Bahasa Inggris (Blanco, 2023).

Media Massa memegang peran krusial dalam menyuarakan kritik, mengajukan pertanyaan, dan melakukan penyelidikan yang cukup luas (Blanco, 2023). Maka dari itu media massa menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap dinamika sistem politik. Masyarakat juga bisa mengetahui serta menilai bagaimana kinerja dari para pemerintah yang disebarluaskan melalui media. Banyaknya media yang cenderung menyajikan informasi dengan orientasi positif, namun tak jarang pula media menampilkan aspek-aspek negative dari suatu peristiwa.

Akan tetapi seperti yang ditampilkan oleh *SBS*, salah satu Media di Australia yang bersifat lebih terbuka. *SBS* mengatakan bahwa Perdana Menteri Australia itu mengunjungi ke beberapa bagian pusat bantuan darurat pasca kebakaran Australia berlangsung (*SBS News*, 2019). Namun Media *ABC* yang lebih menekankan Scott Morrison untuk lebih tanggap dengan kebakaran hutan yang melanda Australia (Barraclough, 2021). Melalui media dan penyebaran informasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai respons pemerintah terhadap kasus kebakaran di Australia serta menilai kinerja sistemnya.

3.2 Ekonomi dan Militer

Dalam teori *Decision Making* oleh *William D. Coplin*, faktor yang turut memengaruhi kebijakan luar negeri adalah ekonomi dan militer. Ekonomi dan militer merupakan sebuah aspek yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan. Perekonomian menjadi salah satu alasan terbentuknya interaksi antar Negara dari proses Kerjasama. Dengan terjadinya suatu interaksi internasional tentu diperlukannya suatu kebijakan guna mencapai tujuan bersama. Begitupula dengan militer, sebagaimana Negara memerlukannya adanya pertahanan yang berasal dari kekuatan militer.

3.2.1 Peran Ekonomi.

Seperti yang telah dipaparkan pada sebelumnya bahwa Scott Morrison berasal dari Partai Liberal, dengan sistem politik sayap kanan tengah. Dengan maksud bahwa Morrison lebih terbuka dengan sistem perekonomian negara daripada yang lain. Pada masa Scott Morrison menjabat, ia berjanji untuk menurunkan emisi rumah kaca menjadi nol persen pada tahun 2050.

Salah satu ciri negara yang maju ialah dengan memiliki angka perekonomian yang baik. Australia sendiri termasuk kedalam salah satu jajaran negara dengan perekonomian terbaik di dunia. Hasil perekonomian yang dihasilkan oleh Australia banyak dari berbagai macam industri namun salah satunya yang terbesar ialah tambang batu-bara. Tambang batu-bara ini di ekspor ke beberapa Negara seperti China, Jepang, United States, Republic of Korea, Singapore, New Zealand, United Kingdom, India, Malaysia dan Thailand (Department of Foreign Affairs and Trade, 2020). Namun

peringkat teratas jumlah ekspor Australia yaitu ke Tiongkok sebesar \$2.754m pada tahun 2018 hingga 2019 (DFAT, 2020). Menjadikan China sebagai mitra terbesar Australia dalam menjalani aktivitas perdagangan ekonomi dan selanjutnya diikuti oleh beberapa seperti Jepang, Korea dan United Kingdom (DFAT, 2020).

Scott Morrison sebagai Perdana Menteri Australia yang berasal dari Partai Liberal, yang fokusnya ada pada bidang perekonomian. Menjadikan isu lingkungan yang tengah terjadi pada tahun 2019 sebagai hal yang bukan menjadi prioritasnya. Namun, selama menjabat sebagai perdana Menteri, Morrison tidak sedikit mendapatkan teguran bahkan desakan untuk lebih tanggap dengan kebakaran yang melanda Australia. Efek dari kebakaran tersebut dirasakan juga oleh beberapa negara seperti New Zealand. Sebagaimana asap dari kebakaran hutan Australia mengubah gletser New Zealand menjadi berwarna kecoklatan (AFP, SBS, 2020).

Sebagai negara penghasil batu-bara terbesar di dunia, Scott Morrison yang berfokus dengan isu ekonominya. Proses pengeboran batu-bara yang nantinya akan di ekspor ke beberapa Negara di atas menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan iklim. Maraknya ekspor bahan bakar ke luar negeri dapat meningkatkan intensitas kerusakan lapisan ozon pada penggunaan bahan bakar sehari-hari. Sebagai negara penghasil bahan bakar batu-bara sebanyak 69.592ton yang di ekspor (DFAT, 2020), seharusnya sudah menjadi kebijakan dan ketegasan pemerintah untuk menyeimbangkan

perekonomian serta pemulihan lingkungan akibat proses pengerukan wilayah batu bara.

Sebagai negara penghasil bahan bakar terbesar, sudah semestinya pemerintah lebih tegas untuk mengurangi produksi penjualan bahan bakar batubara. Perindustrian bisa dialokasikan ke sektor peternakan yang lebih ramah lingkungan. Sehingga tidak hanya berfokus pada batu-bara dan emisi yang ditimbulkan bisa lebih ringan

3.2.2 *Peran Militer*

Untuk menjaga sistem kedaulatan suatu negara tentu diperlukannya peran militer. Australia sebagai salah satu jajaran negara maju sudah seharusnya memiliki kekuatan militer guna menjaga keamanan negara. Peran Militer sendiri ini merupakan suatu bentuk pertahanan negara yang bersandar pada kekuatan militer. Mulai dari angkatan darat, angkatan laut hingga angkatan udara yang mana memiliki tugas masing-masing yaitu untuk menjaga keamanan serta kedaulatan negara.

Dalam konteks pelaksanaan peran militer, Australia membentuk *Defence White Paper* atau *DWP*. Laporan ini berisi kebijakan-kebijakan terkait isu krusial seperti pertahanan jangka panjang (Nicole Brangwin, 2015). Seperti dengan penjelasannya mengenai bahasan pertahanan negara dan tentu bagaimana pun *DWP* membahas hal-hal yang realistis. Serta bertanggung jawab penuh dengan segala bentuk yang terjadi dalam bentuk

pertahanan Negara (Nicole Brangwin, 2015). Seperti dengan penjelasan mengenai bahasan pertahanan negara, DWP membahas hal-hal realistis dan bertanggung jawab dengan segala bentuk yang terjadi secara fisik (Nicole Brangwin, 2015). Secara konsep dari DWP ini sangatlah umum pada negara Federal dibanding dengan negara bagian yang mana Australia sendiri merupakan negara federal. Dalam pidato yang disampaikan pada tahun 2013 oleh Menteri Pertahanan Australia yaitu Stephen Smith sebagaimana mengungkapkan bahwa Defence White Paper serta Australia Defence Force Posture Review yang akan memfokuskan Australia bagian Utara untuk memulai pelatihan bentuk pertahanan strategis Australia (Dr Nathan Church, 2015). Namun adakalanya untuk memfokuskan pelatihan militer di Australia bagian Utara memiliki sebuah kendala yaitu beberapa infrastruktur masyarakat yang terbilang kurang memadai serta membutuhkan biaya yang cukup signifikan.

Akan tetapi melihat dari segi lapangan yang cukup untuk melakukan pelatihan militer yaitu dengan luas tanah berkisar 871.000 hektar lahan dengan diisi sekitar 300 properti untuk memulai pelatihan militer disana, dan sudah semestinya Australia mengeluarkan anggaran khusus untuk mengakomodasikan bentuk pertahanan negara yang dilakukan di Australia bagian Utara. Dan biaya yang dikeluarkan untuk

memfasilitasi pelatihan militer itu sebesar kurang lebih \$2.0 miliar per tahun (Dr Nathan Church, 2015). Namun, tentu dengan nominal biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, *Australia Defence Force* juga memberikan jasa-jasa pelayanan mereka seperti *Landing Helicopter Docks*, pesawat tempur *F-35A Lightning II*, *P-8A Poseidon aircraft and Triton UAVs*, serta yang terakhir *Chinook 'Foxtrot helicopters* di mana itu semua bisa digunakan sebagaimana mestinya untuk pelatihan serta jikalau ada invasi khusus yang dikeluarkan Australia yang mana itu semua digunakan untuk menjaga pertahanan negara (Dr Nathan Church, 2015).

Tak hanya itu, pada kebakaran hutan yang melanda Australia dengan titik api yang menyebar hampir di seluruh wilayah Australia di penghujung tahun 2019 silam, Scott Morrison pun mulai mengerahkan sejumlah angkatan militernya dengan mengirimkan sejumlah pesawat udara, helikopter Chinook dan Black Hawk serta kapal Angkatan laut Australia yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan layanan darurat di berbagai negara bagian yang terdampak cukup buruk akibat kebakaran hutan (BBC News Indonesia, 2019). Hal tersebut juga sudah menjadi tanggung jawab negara serta tugas militer yang mana untuk mengamankan wilayah serta masyarakatnya dari kebakaran hutan yang melanda Australia dengan menghanguskan jutaan hektar lahan. Bentuk pertolongan

evakuasi ini dilakukan sebagaimana melihat kebakaran yang semakin meluas dan mengkhawatirkan akan semakin memburuk yang mana bisa memakan korban jiwa semakin banyak pula. Tentunya jika tidak diselesaikan dengan tuntas akan semakin memperburuk keadaan lingkungan di Australia.

3.3 Faktor Internasional

Pada teori yang diterapkan oleh William D. Coplin, faktor ketiga yang mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan adalah faktor internasional. Faktor internasional sendiri merupakan aspek yang dilihat melalui sebuah interaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya guna mencapai tujuan yang disepakati bersama (D.Coplin, March 1974).

Kebakaran hutan Australia yang parah menyebabkan perubahan warna gletser di New Zealand akibat dampak asap kebakaran (CNN Indonesia, 2020). Jika asap dari kebakaran hutan yang mengubah warna gletser New Zealand maka hal itu juga berdampak serius pada kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Interaksi antara Australia dan New Zealand terjadi melalui dampak asap kebakaran hutan, yang tidak hanya mengancam warga Australia tetapi juga memberikan dampak serius di New Zealand. Hal ini termasuk dalam konteks internasional interaction yang dikemukakan oleh William D. Coplin pada *ecological factors*, suatu negara berinteraksi pada suatu kejadian yang melibatkan suatu negara dengan yang lainnya (D.Coplin, March 1974). Hal yang paling mendasar dalam sebuah faktor internasional ialah bahwa setiap negara merupakan organisasi politik yang bersifat teritorial, itu merupakan pengertian dari *Ecological Setting* (D.Coplin,

March 1974). *Ecological Setting* menjadi salah satu komponen penting dalam terjadinya *International Interaction*. *Ecological Setting* tidak hanya membahas interaksi antarnegara, tetapi lebih fokus pada aspek lingkungan (D.Coplin, March 1974). Dampaknya tidak terbatas pada wilayah geografis, melainkan juga mempengaruhi proses pembuat kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.

Kebakaran hutan di Australia memiliki dampak signifikan bagi negara-negara tetangga, serta menciptakan konsekuensi yang terlihat oleh dunia. Terutama mengingat janji Scott Morrison untuk mengurangi emisi selama kampanye. Dan pada akhirnya pemerintahan Australia dibawah kepemimpinan Scott Morrison mengeluarkan beberapa kebijakan yang berfokus kepada pemulihan lingkungan. Kebijakan tersebut seperti *The National Greenhouse and Energy Reporting Scheme*, *The Emissions Reduction Fund* atau *ERF*, *The Renewable Energy* dan masih banyak lagi (Australian Government, 2020). Di mana semua kebijakan tersebut berfokus ke sektor lingkungan dan menerapkannya kepada seluruh perusahaan besar. Yang nantinya perusahaan-perusahaan besar tersebut akan tetap melakukan kegiatan perekonomian. Hanya saja dengan menerapkan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak yang dikeluarkan kepada sektor lingkungan.

Hal ini akan mengubah dinamika interaksi internasional, terutama bagi perusahaan besar yang berinteraksi dengan perusahaan Australia. Terutama yang terlibat dalam sektor batu-bara, dimana sekarang diharuskan melapor emisi mereka. Scott Morrison memberikan langkah bagus untuk memulai dalam memulihkan kerusakan lingkungan yang pada awalnya ia bersikap tidak peduli. Sudah menjadi

tanggung jawab Scott Morrison sebagai kepala negara di mana selain memberikan kebijakan terkait lingkungan. Perdana Menteri Australia juga membahas terkait koordinasi pada setiap pemerintahan Australia yang berkaitan dengan terjadinya kerusakan lingkungan khususnya kebakaran hutan yang silam (Australian Government, 2020). Kebakaran yang terjadi di pada penghujung tahun 2019 hingga 2020 silam mengharuskan Australia dengan tanggap dan serius untuk memperhatikan emisi yang mereka hasilkan. Baik dari kerusakan alam itu sendiri serta dari hasil ekonomi yaitu tambang batu-bara. Hal itu semua cukup penting untuk dilaksanakan sebagaimana untuk menghindari dampak yang lebih buruk pada perubahan iklim di masa depan.

Disamping itu juga tidak sedikit Negara yang menawarkan bantuan terkait untuk mengatasi kebakaran hutan. Negara-negara yang menawarkan bantuannya ada New Zealand, Amerika Serikat, Korea Selatan serta Indonesia dan masih banyak lagi (Parliament of Australia, 2020). Hal ini memicu terjalinnya sebuah bentuk interaksi internasional sebagaimana untuk membahas terkait strategi iklim internasional untuk di masa yang akan datang. Strategi iklim Internasional juga dapat membantu untuk saling mendukung respon dari dunia global kepada Australia untuk memperbaiki emisi yang ditimbulkan. Sesuai dengan Paris Agreement bahwa Australia akan mengurangi emisi, namun yang terjadi emisi meningkat akibat kebakaran hutan dan berdampak ke New Zealand. Kebakaran yang melanda Australia sangat memberikan dampak serius, baik itu kepada lingkungan, maupun seluruh makhluk hidup disana. Dampak tersebut juga cukup dirasakan oleh New Zealand yang terletak bersebelahan dengan Australia. Warga New Zealand khawatir terkait kondisi lingkungan mereka dimasa yang akan datang

jiakalau kebakaran melanda Australia kembali. Walaupun New Zealand cukup merasakan dampak dari kebakaran hutan di Australia, namun tidak ada tekanan dari New Zealand terkait hal tersebut. Setelah mengetahui kebakaran yang melanda Australia dan dampaknya juga megarah pada New Zealand, mereka dengan sigap menawarkan bantuan. New Zealand mengirimkan bantuan berupa petugas pemadam kebakaran. Pihak New Zealand sendiri cukup puas dengan mengirimkan bantuan tersebut dan mengatakan bahwa ini membuktikan kedekatan antara kedua negara tersebut (Plummer, 2022). Namun bukan pihak New Zealand yang menekan Australia untuk memulihkan keadaan linglungannya. Australia mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, salah satunya Perdana Menteri Inggris yang menyerukan Australia untuk melakukan pengurangan emisi lebih serius (Dziedzic, 2021).

Dan proses perindustrian ekonomi tetap berjalan namun dengan memperhatikan jumlah emisi yang dikeluarkan sehingga bisa lebih rendah. Scott Morrison menerapkan kebijakan politik lingkungan untuk mitigasi kerusakan lingkungan tanpa mengakhiri kerja sama Australia dengan negara lain dalam industri batu-bara. Pada fokusnya yang berada di bidang perekonomian negara, Scott Morrison tentu tidak memutus Kerja sama antara negara yang mana tetap melakukan ekspor batu-bara. Hanya saja dengan situasi kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus, Morrison memperketat persyaratan melakukan Kerja sama di bidang perindustrian khususnya batu-bara. Memperhatikan emisi yang ditimbulkan dari proses menjalankan perekonomian adalah langkahnya dalam memulihkan kerusakan lingkungan dan memperbaiki emisi serta menjalankan perekonomian negara (Australian Government, 2020). Terlihat Perdana Menteri

Australia tersebut mulai mencoba menempatkan janjinya yaitu dengan langkah perlahan yaitu memperhatikan gas emisi yang ditimbulkan. Walaupun pada nyatanya dia yang berasal dari Partai Liberal dan dari faksi *dry*. Namun upayanya dalam menanggulangi permasalahan lingkungan mulai ia terapkan sebagai kepala negara dan harus memperbaiki kerusakan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Scott Morrison memilih untuk memprioritaskan kebijakan mitigasi lingkungan. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Decision Making*, riset ini telah menjabarkan peran Scott Morrison dalam menanggulangi kerusakan lingkungan. Pada teori Decision Making terdapat beberapa faktor yang berpengaruh seperti peran politik domestik, peran ekonomi dan militer. serta peran internasional.

Kebakaran hutan yang terjadi di Australia tahun 2019-2020 telah menyulitkan sektor lingkungan. Namun hal itu justru mendorong politik domestik, yang terdapat sistem birokrasi untuk merumuskan kebijakan pemulihan lingkungan. Melalui saluran politik domestik Australia, dampak kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dapat tersampaikan dan dipertimbangkan untuk merumuskan kebijakan pemulihan yang efektif. Australia sendiri yang cukup terkenal dengan tambang batu baranya tentu menjadikan pasar perekonomian di Australia melambung tinggi. Akan tetapi tentu dengan adanya suatu proses penambangan batu bara cukup memberikan dampak besar bagi kerusakan lingkungan. Sehingga Scott Morrison mengeluarkan kebijakan kepada sektor perekonomian, sebagaimana untuk memperhatikan emisi yang mereka keluarkan. Serta Scott Morrison juga mengirimkan beberapa armada militer untuk membantu memulihkan kebakaran hutan. Morrison mengambil langkah-langkah di sektor perekonomian, dengan memberlakukan kebijakan khusus di perindustrian untuk

mengurangi emisi. Selain itu, ia juga mobilisasi angkatan bersenjata untuk mendukung evakuasi dalam menghadapi kebakaran hutan di Australia.

Kebakaran yang terjadi di Australia pada tahun 2019 silam tentu merupakan kebakaran yang cukup luas dengan memakan hampir 10 hektar lahan (Australian Government, 2020). Kebakaran ini berdampak luas tidak hanya di masyarakat Australia, melainkan juga melibatkan negara-negara di sekitarnya. Perbincangan internasional muncul karena janji Scott Morrison untuk mengurangi emisi pada kampanye. Namun kebakaran di Australia justru berdampak signifikan, terutama di negara tetangga seperti New Zealand. Dan sebagai kepala negara, Scott Morrison mulai untuk memenuhi janjinya semasa kampanye yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan guna memulihkan kerusakan lingkungan. Scott Morrison, sebagai anggota Partai Liberal, dapat dapat berpedan lebih aktif dalam pemulihan lingkungan. Meski mendapat kritikan terkait keterbatasan upayanya yang dianggap tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi, terutama terkait industri tambang batu-bara.

Tabel 02. Kesimpulan

No	Indikator	Implementasi
1.	Politik Domestik	<p>Peran dalam mitigasi kerusakan lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Birokrasi membantu dalam proses pembuatan kebijakan yang diterapkan oleh Scott Morrison. 2. Kelompok Partai dalam Partai Liberal telah berkorban untuk mengurangi hasil emisi yang ditimbulkan. 3. Kelompok yang berkepentingan juga telah ikut berkontribusi dalam mengingatkan pemerintah terkait emisi. 4. Media Massa yang berperan sebagai penyalur informasi dari khalayak masyarakat kepada pemerintah guna tercapainya penerapan kebijakan tersebut.
2.	Ekonomi dan Militer	<p>Peran dalam mitigasi kerusakan lingkungan:</p> <p>Kebakaran hutan yang terjadi telah menimbulkan dampak yang cukup besar. Tentu ini salah satu pengaruh besar dalam kerusakan lingkungan. Mengingat bahwa Australia pengekspor batu-bara sebanyak 69.592ton di ekspor dan dengan penjualan terbesar ke Tiongkok berkisar \$2.754. Sehingga Scott Morrison menerapkan beberapa kebijakan</p>

No	Indikator	Implementasi
		kepada sektor perekonomian guna mitigasi kerusakan lingkungan. Scott Morrison juga mengerahkan beberapa tantara untuk proses evakuasi dan juga mengerahkan tiga helikopter Chinhook serta pesawat.
3.	Internasional	Peran dalam mitigasi kerusakan lingkungan: Dampak dari kebakaran yang terjadi di Australia sangat dirasakan oleh warga Australia itu sendiri. Namun dampak tersebut juga dirasakan hingga New Zealand yang bersebelahan dengan Australia. Maka dari itu, kebakaran ini cukup memberikan interaksi sosial. Tidak sedikit Negara yang menawarkan bantuan dalam mengatasi kebakaran hutan. Beberapa Negara yang menawarkan bantuan ialah, New Zealand, Amerika Serikat, Korea Selatan bahkan Indonesia. Hal ini membentuk adanya suatu interaksi internasional.

Dengan begitu, kebijakan yang diterapkan oleh Scott Morrison bisa setidaknya membantu meringankan kerusakan lingkungan. Mengingat Australia dengan penghasil batu-bara terbesar ditambah dengan kebakaran hutan yang melanda, tentu ini sangat memberikan dampak serius ke sektor lingkungan. Namun dengan begitu, interaksi internasional akan terus terjalin sebagaimana beberapa Negara yang turut serta membantu Australia mengatasi kebakaran hutannya. Scott Morrison juga tampak mulai peduli dengan lingkungan sebagaimana menerapkan kebijakan kepada sektor perekonomian guna menurunkan emisi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah kekuarangan dan keterbatasan. Secara khusus, fokus penelitian ini adalah pada peran Scott Morrison dalam mitigasi kerusakan lingkungan. Meskipun ia berasal dari Partai Liberal yang lebih menekankan pada aspek perekonomian negara. Salah satu kekurangan penelitian ini adalah kurang data perbandingan antara pendapatan ekonomi dan jumlah emisi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya dengan

pengumpulan data tambahan, terutama dalam hal perbandingan antara aspek ekonomi dan dampak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP, SBS. (2020, January 02). *Ash from Australian bushfires turns New Zealand glaciers into brown*. Retrieved from SBS News:
<https://www.sbs.com.au/news/article/ash-from-australian-bushfires-turns-new-zealand-glaciers-brown/7ri0e7v2q>
- Anwar, L. A. (2022, Mei 19). *Isu Lingkungan Jadi Perhatian Utama Pemilu Australia*. Retrieved from Kompas.id:
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/05/19/isu-lingkungan-jadi-perhatian-utama-pemilu-australia>
- Arif, A. (2023, Maret 31). *Australia Bakal Menerapkan Harga Karbon untuk Industri*. Retrieved from Kompas.id:
<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/31/australia-bakal-menerapkan-harga-karbon-untuk-industri>
- Associated Press. (2022, 09 08). *Parlemen Australia Loloskan RUU Pengurangan Emisi 43%*. Retrieved from VOA:
<https://www.voaindonesia.com/a/parlemen-australia-loloskan-ruu-pengurangan-emisi-43-/6736284.html>
- Australian Government. (2019-2020). *Black Summer*. Retrieved from Australian Government. Australian Public Service Commission:
<https://www.apsc.gov.au/state-service/state-service-report-2019-20/chapter-1-commitment-service/black-summer>
- Australian Government. (2020, March). *Prospering In a Low-Emissions World: An Update Climate Policy Toolkit For Australia*. Retrieved from Australian Government. Climate Change Authority:
<https://www.climatechangeauthority.gov.au/sites/default/files/Prospering%20in%20a%20low-emissions%20world.pdf>
- Barraclough, A. (2021, November 03). *Australian bushfire survivor Jo Dodds is taking on Scott Morrison at the Glasgow climate summit*. Retrieved from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2021-11-03/australian-bushfire-survivor-cop26/100572726>
- Barry, N. (2018). The Liberal Partu of Australia's Campaign. In P. C. Anika Gauja, *Double Disillusion; The 2016 Australian Federal Election* (pp. 277-297). Canberra, Australia: ANU Press.
- BBC News. (2019, November 11). *Kebakaran hutan Australia: Kawasan Sydney menghadapi ancaman besar, WNI terdampak*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50370686>
- BBC News Indonesia. (2019, December 19). *Kebakaran Australia: Helikopter, Pesawat dan Kapal Militer dikerahkan, Perdana Menteri peringatkan 'masa sulit' kedepan*. Retrieved from BBC News Indonesia:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50960161>
- BBC News Indonesia. (2020, Januari 12). *Kebakaran hutan Australia: PM akui kesalahan penanganan krisis karhutla di negaranya*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51081379>
- Blanco, C. (2023, January 02). *Bagaimana Cara Kerja Media di Australia*. Retrieved from SBS Bahasa Indonesia:
<https://www.sbs.com.au/language/indonesian/id/podcast-episode/how-does-media-in-australia-work/zlpj591np>

- Brilliane, A. A., & Septyanto Galan Prakoso, S. M. (n.d.). Analisis Terhadap Kegagalan Usulan Kebijakan Lingkungan Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS) di Parlemen Australia Pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd Tahun 2007-2010.
- Butler, R. A. (2020, July 11). *The World's Largest Rainforest*. Retrieved from World Rain Forest: <https://worldrainforests.com/facts/the-worlds-largest-rainforests.html>
- Cappucci, M. (2021, July 27). *Australian fires had bigger impact on climate than covid-19 lockdowns in 2020*. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/weather/2021/07/27/australian-bushfires-smoke-climate-covid/>
- CNN Indonesia. (2020, Jan 04). *Asap Karhutla Australia Buat Salju Selandia Baru Berubah*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103111057-113-462098/asap-karhutla-australia-buat-salju-selandia-baru-berubah>
- Coplin, W. D. (1974). *A Theoretical Overview: Introduction to International Politics, second edition*. Chicago U.S.A: Rand McNally College Publishing Co.
- D.Coplin, W. (March 1974). *Introduction to International Politics. Second Edition. A Theoretical Overview*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2020). *Trade and investment at a glance 2020*. Retrieved from Australian Government: <https://www.dfat.gov.au/publications/trade-and-investment/trade-and-investment-glance-2020#:~:text=Australia's%20top%20two%2Dway%20trading,%2C%20India%2C%20Malaysia%20and%20Thailand.>
- DFAT. (2020). *Trade and investment at a glance 2020*. Retrieved from Australian Government: <https://www.dfat.gov.au/publications/trade-and-investment/trade-and-investment-glance-2020#:~:text=Australia's%20top%20two%2Dway%20trading,%2C%20India%2C%20Malaysia%20and%20Thailand.>
- Dr Nathan Church, F. A. (2015, July 9). *The Australian Defence Force in Northern Australia*. Retrieved from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/ADFNthAust
- Greenpeace. (n.d.). *Tentang Kami*. Retrieved from Greenpeace: https://www.greenpeace.org/indonesia/tentang-kami/?psafe_param=1&utm_term=&utm_campaign=GPTH-Drive+Traffic+:+Dynamic+Ad&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=2641717568&hsa_cam=18316300486&hsa_grp=136380207810&hsa_ad=621355663851&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa
- Greenpeace. (n.d.). *What are the solution to climate change?* Retrieved from Greenpeace: <https://www.greenpeace.org.uk/challenges/climate-change/solutions-climate-change/>
- Hamilton, Philip. (2019). *The Australian Public Service*. Retrieved from Parlement of Australia:

- https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook46p/APS
- Harruma, I. (2022, 08 24). *Peran Media dalam Politik*. Retrieved from Kompas.com:
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/24/02000001/peran-media-dalam-politik?lgn_method=google#
- Hastuti, R. K. (2020, January 12). *Hutan Australia Darurat Kebakaran, Ini Langkah Morrison*. Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200112181859-4-129428/hutan-australia-darurat-kebakaran-ini-langkah-morrison>
- Kedutaan Besar Australia. (n.d.). *Sekilas lingkungan hidup Australia*. Retrieved from Kedutaan Besar Australia Indonesia:
https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/lingkungan_hidup.html
- Kinasih, S. (2022, Mei 30). *Kemenangan Partai Buruh Australia dan Masa Depan Politik Lingkungan*. Retrieved from tirto.id:
<https://tirto.id/kemenangan-partai-buruh-australia-dan-masa-depan-politik-lingkungan-gslq>
- Mada, K. (2022, Mei 21). *Morrison Akui Kalah dari Oposisi, Anthony Albanese PM Baru Australia*. Retrieved from Kompas:
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/05/21/pemerintahan-morrison-bisa-berakhir-australia-tetap-tolak-pengungsi>
- Martanto, U. (2007). Perubahan Lingkungan dan Konflik Kekerasan Membaca Papua Melalui Pendekatan Environmental Security. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 11 Nomor 2*, 173-192.
- Mercer, P. (2022, 11 08). *Australia Ingin Menjadi Tuan Rumah KTT Iklim PBB 2026*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/australia-ingin-menjadi-tuan-rumah-kt-iklim-pbb-2026-/6824050.html>
- Nicole Brangwin, N. C. (2015, Agustus 20). *Defending Australia: a history of Australia's defence white papers*. Retrieved from Parliament of Australia:
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/DefendAust
- Nursastri, S. A. (2020, 01 09). *Kebakaran Hutan Australia, Ini 6 Fakta yang Harus Anda Tahu*. Retrieved from Kompas.com:
<https://sains.kompas.com/read/2020/01/09/200400123/kebakaran-hutan-australia-ini-6-fakta-yang-harus-anda-tahu?page=all>
- Parliament of Australia. (2020, March 12). *2019-20 Australian bushfires-frequently asked questions: a quick guide*. Retrieved from Parliament of Australia. Department of Parliamentary Services:
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/7234762/upload_binary/7234762.pdf
- Parliament of Australia. (2022, September). *Infosheet 22 - Political parties*. Retrieved from Parliament of Australia:
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/House_of_Representatives/Powers_practice_and_procedure/00_-_Infosheets/Infosheet_22_-_Political_parties
- Rahajeng Kusumo Hastuti, C. I. (2020, Januari 12). *Hutan Australia Darurat Kebakaran, Ini Langkah Morrison*. Retrieved from CNBC Indonesia:

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200112181859-4-129428/hutan-australia-darurat-kebakaran-ini-langkah-morrison>
- Rumpff, D. L. (2023, February 5). *The Burning of Australia's Nature*. Retrieved from The University of Melbourne:
<https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/the-burning-of-australia-s-nature>
- SBS News. (2019, December 24). *PM says South Australian bushfire is 'torture' for victims*. Retrieved from SBS News:
<https://www.sbs.com.au/news/article/pm-says-south-australian-bushfire-is-torture-for-victims/yxr3t5kds>
- Siahaan, V. R. (2020). *Politik Lingkungan Indonesia*. Jakarta: UKI Press. Singh, A. (April 2020). Case Study on 2019 Australian Bushfire.
- Sorongan, T. P. (2022, May 23). *Mengenal PM Baru Australia, Pendukung Iklim Anti Batu Bara?* Retrieved from CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220523125755-4-341066/mengenal-pm-baru-australia-pendukung-iklim-anti-batu-bara>
- Turnbull, T. (2020, Mei 23). *Anthony Albanese pimpin Australia sebagai PM baru, siapa dia dan apa pengaruhnya bagi Indonesia?* Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61547445>
- VOA Indonesia. (2022, 08 03). *Pemerintah Baru Australia Yakin RUU Pengurangan Emisinya Disetujui Parlemen*. Retrieved from VOA:
<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-baru-australia-yakin-ruu-pengurangan-emisinya-disetujui-parlemen/6685091.html>
- Yu, P., & Rongbun Xu, M. J. (2020). *Bushfire in Australia: a serious health emergency under climate change*.